



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIYOS SANTOSO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 54223

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	380.000.000
1. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	219.000.000
1. MOTOR, KAWASAKI KLX SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, HONDA ADV 150 SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
4. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 143.000.000		
5. MOTOR, INDOMOBIL EMOTOR SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	470.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	874.116.948
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.943.116.948
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.943.116.948



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.